KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 17 Desember 2019

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Media Indonesia Halaman 1	Selasa, 17 Desember 2019	Belum Sempurna, Perbaikan Segera Dilakukan	Dengan mobil SUV berisi empat penumpang, tim Media Indonesia melaju pada kecepatan rata-rata antara 63 km/jam dan 72 km/jam. Untuk melintasi tol layang Jakarta-Cikampek memang di anjurkan agar kecepatan kendaraan tidak lebih dari 80 km/jam.
2	Tempo Ekonomi Bisnis Halaman 3	Selasa, 17 Desember 2019	Ridwan Kamil Undang Investor Uni Emirate Arab	Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menawarkan sejumlah peluang investasi kepada investor Uni Emirat Arab. Dalam kunjungan yang dilakukan sejak akhir pekan lalu itu, Ridwan menuturkan, para investor UEA tertarik masuk ke sektor manufaktur dan pariwisata. “Dua sektor itu menjadi pembicaraan di Abu Dhahi dan keduanya menjadi kunci perekonomian di Jawa Barat, “Ujar Ridwan dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
3	Media Indonesia Halaman 4	Selasa, 17 Desember 2019	Presiden Minta Ibu Kota Baru Ramai dan Berbiaya Murah	Presiden Joko Widodo mengingatkan pemindahan ibu kota negara tidak menelan biaya besar. Justru ibu kota yang berlokasi di Kalimantan timur harus mampu menjadi motor mempercepat transportasi ekonomi.
4	Bisnis Indonesia Halaman 6	Selasa, 17 Desember 2019	Tol dan Masa Depan Bumi Andalan	Pembangunan megaproyek Tol Trans Sumatra dimulai pada 2015. Saat ini, jalan tol itu telah beroprasi di empat ruas, yaitu Medan-Binjai (17kilometer), Palembang-Indralaya (22 km), Bakauheni-Terbanggi Besar (140,9 km), dan terbanggi Besar-Kayu Agung (189 km) .
5	Bisnis Indonesia Halaman 6	Selasa, 17 Desember 2019	Melanjutkan Visi Bung Karno Membangun Basis Produksi	Lima tahun terakhir bukan tahun yang menggembirakan bagi Sumatra. Pulau yang menjadi motor perekonomian kedua bagi Indonesia itu tengah payah. Mesin-mesin penghasil uang lesu darah karena tarpaper penurunan harga komoditas.
6	Bisnis Indonesia Halaman 7	Selasa, 17 Desember 2019	Merekam Geliat Tanah Sumatra	Pembangunan infrastruktur jalan tol pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi prioritas utama. Tujuan pembangunan infrastruktur tersebut selain untuk menekan biaya logistik juga untuk pemerataan ekonomi di Indonesia.
7	Bisnis Indonesia Halaman 10	Selasa, 17 Desember 2019	Layanan Jagowari ditingkatkan	PT Jasa Marga (persero) Tbk. Berupaya terus meningkatkan layanan jalan tol di ruas tol Jakarta-Bogor-Ciawi alias Jagorawi, terkait di setujuinya penyesuaian tarif ruas tol tersebut yang mulai berlaku kamis (19/12).
8	Bisnis Indonesia	Selasa, 17 Desember	13 Paket Konstruksi	Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, nilai pekerjaan konstruksi (harga Pemikiran sendiri) dari

	Halaman 10	2019	Dilelang	13 paket yang dilelang mencapai Rp8,77 triliun. Proyek Bendungan Jragung di Jawa Tengah menjadi proyek dengan nilai terbesar, yaitu Rp2,72 triliun.
9	Bisnis Indonesia Halaman 10	Selasa, 17 Desember 2019	Berita Foto	Kendaraan melintas di jalan tol Bogor-Ciawi sukabumi (Bocimi) seksi 1 ciawi-Cigombong di cigombong, kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (16/12). Kelanjutan pembangunan jalan tol Bocimi seksi ll (Cigombong-Cibadak) Sepanjang 11,9 km saat ini pembebasan lahanya sudah mencapai lebih dari 70% dan telah memasuki tahap konstruksi serta diharapkan selesai sesuai rencana pada 2020
10	Kompas Halaman 13	Selasa, 17 Desember 2019	Jalan Tol Menarik Masyarakat	Pengoperasian jalan tol di sekitar Jakarta Serta Bakauheni sampai Palembang di Sumatera diperkirakan menarik masyarakat untuk mencoba ruas tol pada liburan Natal dan Tahun Baru. Mengacu pada perkiraan itu, titik penumpukan kendaraan mungkin terjadi di pelabuhan dan beberapa gerbang tol.
11	Media Indonesia Halaman 15	Selasa, 17 Desember 2019	Tantangan bagi Program Sejuta Rumah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengumumkan pembangunan program Sejuta Rumah mencapai 1,21 juta unit per Desember 2019. Adapun target yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini sekitar 1,25 juta unit.
12	Media Indonesia Halaman 15	Selasa, 17 Desember 2019	Berita Foto	Foto udara pembangunan rumah bersubsidi di Banyuasin, Sumatra Selatan, bebarapa waktu lalu. Pencapaian empat tahun pemerintahan Joko Widodo-jusuf kala di bidang penyediaan perumahan rakyat sebanyak 1.139.672 unit yang terbangun lewat program Sejuta Rumah.
13	Kompas Halaman 17	Selasa, 17 Desember 2019	Beda Gelombang di Jalan Tol Layang	Foto karya wartawan foto Kompas, Totok Wijayanto, ini diabadikan pada Minggu (15/12/2019), Totok menggunakan lensa 70-200 mm dari atap Hotel Amaris di Kawasan Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat, Saat memotret frame itu, posisi lensa Totok berada di angka 200mm, itu berarti bahwa pemotretan dilakukan dengan lensa 200 mm. selain itu Totok juga melakukan cropping atas foto didapatkannya

Judul	**Belum Sempurna, Perbaikan Segera Dilakukan**	Tanggal	Selasa, 17 Desember 2019
Media	Media Indonesia Halaman 1		
Resume	Dengan mobil SUV berisi empat penumpang, tim Media Indonesia melaju pada kecepatan rata-rata antara 63 km/jam dan 72 km/jam. Untuk melintasi tol layang Jakarta-Cikampek memang di anjurkan agar kecepatan kendaraan tidak lebih dari 80 km/jam.		

MI/RAMDANI

SUASANA MALAM TOL LAYANG: Foto dari udara suasana malam Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated di Bekasi, Jawa Barat, kemarin. Tol layang sepanjang 36,4 kilometer yang merupakan tol layang terpanjang di Indonesia itu mulai beroperasi tanpa tarif sejak Minggu (15/12) untuk kendaraan golongan I dengan minimum kecepatan 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam.

TOL LAYANG

Belum Sempurna, Perbaikan Segera Dilakukan

DENGAN mobil SUV berisi empat penumpang, tim *Media Indonesia* melaju pada kecepatan rata-rata antara 63 km/jam dan 72 km/jam. Untuk melintasi Tol Layang Jakarta-Cikampek memang dianjurkan agar kecepatan kendaraan tidak lebih dari 80 km/jam.

Tim menyusuri tol layang sepanjang 36,4 km itu untuk membuktikan apa yang menjadi perbincangan publik, yakni mengenai ketidakrataan struktur jalan.

Benar saja, jalan terasa bergelombang. Tidak mulus dan tidak rata. Semua penumpang di dalam mobil merasakan guncangan. Belum lagi, setiap melintas di atas sambungan antarblok, jalan terasa semakin tidak rata.

"Saat melintasi Tol Layang Japek ini saya teringat dengan periode awal diresmikannya Tol Tanjung Priok-Cawang. Namun, saat ini jalur tersebut tidak begitu bergelombang lagi," ujar sopir kendaraan yang membawa tim *Media Indonesia*. Hingga tulisan ini diturunkan, tim masih melintas di Kilometer 23 Tol Layang Japek, kemarin.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengatakan Tol Layang Japek mampu membantu sebanyak 40 kendaraan per menit. Keberadaan tol itu, menurutnya, akan membantu lalu lintas selama Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Meski demikian, ungkap Budi, perbaikan menyangkut keselamatan masih perlu dilakukan.

"Rata-rata kemarin untuk jalur A dari Jakarta ke Cikampek itu sekitar 20 kendaraan per menitnya. Kemudian dari Cikampek ke arah Jakarta puncaknya sekitar 40 kendaraan per menit. Saya kira sudah cukup bagus," tambah Budi.

Adapun dari sisi keselamatan, lanjutnya, masih diperlukan perbaikan oleh pihak Jasa Marga. Pertama, perihal *concrete barrier* dan *water barrier* yang masih harus diperbaiki. Fasilitas yang telah terpasang saat ini, menurut Budi, memberi kesan mempersempit jalan.

Kedua, adanya marka jalan lama yang belum dihapus sehingga berpotensi menyulitkan dan membingungkan masyarakat.

"Ketiga, petunjuk berupa rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) yang ditaruh di atas untuk mengarahkan ke tol biasa Japek atau tol *elevate* Japek perlu dipasang menggunakan *neon box*. Hal itu bertujuan agar saat malam hari, papan informasi ini tetap terlihat dengan jelas," papar Budi.

Pihaknya pun mewanti-wanti para pengendara agar tidak melajukan mobil di atas kecepatan 80 km/jam. Hal itu karena masih ada sambungan siar muai (*expansion joint*) yang belum sempurna sehingga menimbulkan lompatan yang bisa membahayakan pengendara ataupun penumpang.

"*Expansion joint* itu yang akan diperbaiki, baik oleh Jasa Marga maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," pungkasnya. (Jek/Hld/X-7)

Judul	**Ridwan Kamil Undang Investor Uni Emirate Arab**	Tanggal	Selasa, 17 Desember 2019
Media	Tempo Ekonomi Bisnis Halaman 3		
Resume	Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menawarkan sejumlah peluang investasi kepada investor Uni Emirat Arab. Dalam kunjungan yang dilakukan sejak akhir pekan lalu itu, Ridwan menuturkan, para investor UEA tertarik masuk ke sektor manufaktur dan pariwisata. “Dua sektor itu menjadi pembicaraan di Abu Dhahi dan keduanya menjadi kunci perekonomian di Jawa Barat, “Ujar Ridwan dalam keterangan tertulisnya, kemarin.		

EKONOMI DAN BISNIS

Ridwan Kamil Undang Investor Uni Emirat Arab

Kawasan segitiga Rebana dan jalan tol Bandung-Tasikmalaya-Banjar menjadi proyek prioritas.

EDISI, 17 DESEMBER 2019

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur Jawa Barata, Ridwan Kamil saat melakukan kunjungan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Sabtu lalu. maritim.go.id

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menawarkan sejumlah peluang investasi kepada investor Uni Emirat Arab. Dalam kunjungan yang dilakukan sejak akhir pekan lalu itu, Ridwan menuturkan, para investor UEA tertarik masuk ke sektor manufaktur dan pariwisata. "Dua sektor itu menjadi pembicaraan di Abu Dhabi dan keduanya menjadi kunci perekonomian di Jawa Barat," ujar Ridwan dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Ridwan adalah salah satu gubernur yang mendampingi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam lawatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dalam lawatan itu, Luhut bertemu dengan sejumlah petinggi Uni Emirat Arab guna membahas realisasi investasi negara itu di Indonesia.

Ridwan diminta memberi paparan perihal peluang investasi di wilayahnya. Pada pertemuan itu, Ridwan menawarkan investasi di pusat industri baru di kawasan segitiga Rebana (kawasan antara Kertajati, Patimban, dan Cirebon), serta rencana jalan tol Bandung-Tasikmalaya-Banjar (Cigatas) dengan nilai proyek Rp 50 triliun.

Jalan tol Cigatas hanyalah salah satu dari proyek Rp 113 triliun yang akan dikembangkan Jawa Barat. Proyek lainnya adalah pusat konvensi dan ekshibisi serta tiga proyek waste to energy di Jawa Barat. "Meski Jawa Barat lagi jadi primadona, kami harus proaktif," kata dia.

Bukan kali ini saja Ridwan berkunjung ke Abu Dhabi. Maret lalu, Ridwan bertemu dengan sejumlah investor di sana. Dalam pertemuan itu, para pengusaha UEA menunjukkan minat yang tinggi. Mereka bersedia menjadi mitra bagi pengusaha kecil dan menengah di Jawa Barat. Namun mereka meminta jaminan dalam hal perizinan, yang diharapkan bisa terbit cepat. Kehadiran para pemodal dari UAE diharapkan bakal memberikan banyak dampak bagi pertumbuhan industri di Jawa Barat.

Menteri Luhut menambahkan, proses negosiasi investasi UEA ke Indonesia sudah berlangsung enam bulan. Pertemuan di Abu Dhabi tersebut merupakan kelanjutan dari finalisasi draf kesepakatan yang akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Presiden berencana melawat ke Abu Dhabi pada 13 Januari 2020.

"Setelah enam bulan kami kerjakan, ternyata hasilnya berjalan dengan baik. Misalnya dengan ADNOC, Mubadala, dan Pertamina, progresnya sangat baik. Baik itu progres di kilang Balongan maupun Balikpapan," kata Luhut, kemarin. Ia berharap beberapa proyek itu akan ditandatangani pada 13 Januari 2020, dengan disaksikan Presiden Jokowi dan Putra Mahkota Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi.

Luhut mengatakan telah meminta investor UEA menambah rencana investasinya dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Jawa Barat. Pengembang energi terbarukan asal UEA, Masdar, misalnya sudah mendapat hak pengerjaan proyek pembangkit tenaga surya Floating PV Power Plant di Waduk Cirata, Purwakarta.

"Proyek 145 MW berupa floating energy di tempatnya Pak Ridwan sudah jalan," kata Luhut. Ia menambahkan, Ridwan telah meminta para investor untuk membangun proyek serupa di Danau Saguling, Jatigede, dan Jatiluhur. Kapasitas totalnya ratusan megawatt. "Ini sekaligus membuktikan bahwa Indonesia sangat pro terhadap energi hijau," kata Luhut. **AHMAD FIKRI | YANDHRIE ARVIAN**

Membangun Kilang hingga Masjid

Pemerintah tengah menjemput investasi dari Uni Emirat Arab. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan realisasi komitmen investasi dari Timur Tengah itu bisa terwujud pada Januari 2020.

Berikut ini sejumlah proyek yang diminati investor Uni Emirat Arab:

- Pengembangan kilang minyak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Proyek ini akan digarap oleh PT Pertamina (Persero) dan Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc).
- Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Pembangkit listrik berkapasitas 145 megawatt ini digarap oleh PT PLN (Persero) bersama Masdar.
- Pembangunan masjid besar atau Grand Mosque di Solo, Jawa Tengah. Masjid yang dibangun akan menyerupai Grand Mosque di Abu Dhabi.
- Investasi lahan pertanian 100 ribu hektare di Kalimantan Tengah.
- Pembentukan skema pembiayaan Sovereign Wealth Fund (SWF).
- Program *e-learning* (hibah).

FAJAR PEBRIANTO

Judul	**Presiden Minta Ibu Kota Baru Ramai dan Berbiaya Murah**	Tanggal	Selasa, 17 Desember 2019
Media	Media Indonesia Halaman 4		
Resume	Presiden Joko Widodo mengingatkan pemindahan ibu kota negara tidak menelan biaya besar. Justru ibu kota yang berlokasi di Kalimantan timur harus mampu menjadi motor mempercepat transportasi ekonomi.		

Presiden Minta Ibu Kota Baru Ramai dan Berbiaya Murah

PRESIDEN Joko Widodo menginginkan pemindahan ibu kota negara tidak menelan biaya besar. Justru ibu kota yang berlokasi di Kalimantan Timur harus mampu menjadi motor mempercepat transformasi ekonomi.

"Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman beberapa negara yang pindah ibu kotanya, tapi jadi mahal," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Menurut Presiden, dana pemindahan ibu kota Rp466 triliun cukup besar meski porsi APBN hanya mencapai Rp89,4 triliun atau sebesar 19,2 %. Harus ada inovasi dan pemanfaatan teknologi demi menekan biaya.

"Kita harus meninggalkan cara berpikir lama yang selalu melihat semuanya dari sisi anggaran, melihat semua dari sisi biaya. Kita harus berani menggunakan cara-cara baru yang lebih kreatif," tegas Presiden Jokowi.

Presiden menekankan ibu kota tidak boleh sepi dengan hanya dihuni pegawai pemerintahan. Ibu kota baru juga dirancang sebagai perpindahan basis ekonomi menuju kota modern dan canggih.

Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan beberapa klaster akan dibangun di ibu kota. Di antaranya klaster pendidikan, klaster kesehatan, klaster riset, dan pengembangan moda transportasi massal kelas dunia.

"Kita berharap pusat riset ke depan jadi bagian hubungan riset internasional atau bagian dari *lead integrator* untuk riset kelas dunia mengembangkan atau menggunakan moda transformasi massal," kata Suharso.

Suharso menyebut bentuk pemerintahan ibu kota baru seperti daerah otonomi. Ibu kota baru akan memiliki wewenang khusus sehingga tidak berfungsi seperti pemerintahan di daerah lainnya.

Di dalamnya, terdapat area terbatas seluas 6.000 hektare (ha) yang dipimpin manajer kota. Area itu masuk bagian pusat pemerintahan seluas 40 ribu ha.

Total luas lahan ibu kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ini, mencapai 250 ribu ha.

Pemindahan ibu kota mempertimbangkan aspek ketahanan bencana, daya dukung lingkungan, ketersediaan air, lahan infrastruktur, keekonomian, hingga keamanan.

Desain ibu kota pun dilakukan melalui sayembara. Sebanyak 762 orang sudah menyetor desain ibu kota baru, baik secara perseorangan maupun kelompok. (Medcom/P-2)

ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY

RATAS PEMINDAHAN IBU KOTA: Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Dalam rapat tersebut presiden menegaskan, pemindahan ibu kota ialah bentuk percepatan transformasi ekonomi di Kalimantan Timur.

Judul	**Tol dan Masa Depan Bumi Andalan**	Tanggal	Selasa, 17 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 6		
Resume	Pembangunan megaproyek Tol Trans Sumatra dimulai pada 2015. Saat ini, jalan tol itu telah beroprasi di empat ruas, yaitu Medan-Binjai (17kilometer), Palembang-Indralaya (22 km), Bakauheni-Terbanggi Besar (140,9 km), dan terbanggi Besar-Kayu Agung (189 km) .		

JELAJAH INFRASTRUKTUR SUMATRA

Tol dan Masa Depan Bumi Andalas

Satu demi satu, pembangunan jalan Tol Trans-Sumatra yang dimulai sejak 2015 rampung. Perlahan tapi pasti, jalan tol juga mulai memberikan maslahat bagi masyarakat.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Pembangunan megaproyek Tol Trans-Sumatra dimulai pada 2015. Saat ini, jalan tol itu telah beroperasi di empat ruas, yaitu Medan—Binjai (17 kilometer), Palembang—Indralaya (22 km), Bakauheni—Terbanggi Besar (140,9 km), dan Terbanggi Besar—Kayu Agung (189 km).

Pada awal 2020, Tol Pekanbaru—Dumai (131 km) dijadwalkan beroperasi. Walhasil, dalam 5 tahun saja, PT Hutama Karya (Persero) bisa mengoperasikan 500 km. Sebuah pencapaian baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Bisnis menyaksikan secara langsung pembangunan Trans-Sumatra, mulai dari Agustus 2018 di ruas Bakauheni—Terbanggi Besar hingga Pekanbaru—Dumai pada November 2019.

Bisnis juga menerjunkan Tim Jelajah Infrastruktur Sumatra sebanyak tiga kali dalam rentang April hingga November 2019 guna memotret peluang ekonomi yang muncul dari keberadaan jalan tol.

Pada fase pertama, *Bisnis* melawat ke dua provinsi, yaitu Lampung dan Sumatra Selatan pada akhir April 2019. Fase kedua pada September juga melawat ke dua provinsi itu, ditambah dengan lawatan ke Bengkulu. Adapun, fase terakhir pada November 2019, *Bisnis* menyambangi Provinsi Riau.

Hasil penjelajahan menunjukkan keberadaan jalan tol ternyata telah memicu geliat di sektor jasa dan ekonomi rakyat. Angkutan penyeberangan di Pelabuhan Merak tumbuh hingga 7% dalam periode Maret—April 2019.

"Selain karena adanya Trans-Sumatra, kenaikan [jasa penyeberangan] juga disebabkan oleh [kenaikan harga] tiket pesawat," ujar General Manager PT ASDP Cabang Merak Capt. Solikhin.

Sektor perhotelan juga berkembang dalam 8 bulan operasional jalan Tol Bakter. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, tingkat penghunian kamar berbintang dalam periode Maret—Oktober 2019 naik 26 basis poin menjadi 59,16%.

Jumlah tamu menginap secara kumulatif dibandingkan dengan periode Maret—Oktober 2018 tumbuh 27% menjadi 421.037 orang.

EKOSISTEM NONTUNAI

Pengoperasian jalan tol di Sumatra menjadi pintu masuk bagi pengembangan transaksi nontunai. Di pelabuhan penyeberangan, baik Merak maupun Bakauheni, operator sudah menerapkan cara nontunai.

Dalam dua episode Jelajah Infrastruktur Sumatra, *Bisnis* pun menggunakan kartu uang elektronik TapCash yang diterbitkan PT Bank Negara Indonesia (Persero).

Kalangan perbankan di Sumatra bagian selatan menilai pengoperasian jalan tol bakal meningkatkan penetrasi transaksi nontunai di wilayah itu. Adapun, di Sumatra bagian tengah, jalan tol diharapkan bisa membuka ekosistem pembayaran nontunai di Riau hingga Sumatra Barat.

Head of Performance and Channel Management Group Bank BNI Wilayah Palembang Yudi Indra mengatakan sektor transportasi, yakni jalan tol dan penyeberangan bakal membentuk ekosistem pembayaran nontunai di Sumbagsel.

Dia menggambarkan pada masa angkutan Lebaran 2019, penggunaan TapCash yang diterbitkan BNI mencapai 30.000 kartu, jumlah yang cukup signifikan.

Kewajiban penggunaan kartu uang elektronik juga menjadi berkah bagi Habib. Dia membuka gerai tak jauh dari akses gerbang Tol Terbanggi Besar. Saban hari, dia bisa menjual 24 kartu uang elektronik dan omzet pengisian ulang hingga Rp5 juta. "Banyak yang cari kartu *e-toll* karena masuk tol harus pakai kartu," tuturnya kepada *Bisnis*.

Boleh dibilang, pengemudi truk menjadi pihak yang paling menikmati keberadaan jalan tol di Sumatra. Kini, bila melalui jalan tol, Bakauheni hingga Kayu Agung bisa ditempuh dalam 5,4 jam dengan kecepatan rerata 60 km per jam.

Bisnis sempat menemui sejumlah sopir truk di Lampung maupun Palembang. Jawaban mereka sama, jalan tol bisa memangkas waktu tempuh dan mengurangi risiko gangguan keamanan.

Sugih, sopir truk yang telah mengaspal lebih dari 10 tahun di Lampung menuturkan, kehadiran jalan tol sangat membantu pengemudi, baik dari segi waktu maupun efisiensi dalam biaya operasional. "Kalau lewat lintas Sumatra bisa 4 hari sampai Palembang. Kalau lewat tol sehari bisa sampai," katanya

MEMBUKA ISOLASI

Secara umum, kehadiran jalan tol dinilai akan membuka wilayah-wilayah di Sumatra yang selama ini terisolasi akibat kondisi jalan yang tidak mantap.

Data Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan, pada 2017 panjang jalan nasional yang tidak mantap di Sumatra mencapai 1.370 km atau hampir 10% dari total panjang jalan nasional di Pulau Andalas.

Dari 10 provinsi di Sumatra, tiga provinsi yaitu Lampung, Sumsel, dan Riau mencetak nisbah panjang jalan tidak mantap tertinggi. Sekitar 45% jalan nasional yang rusak di Sumatra berada di tiga provinsi tersebut.

Salah satu wilayah yang tak luput dari perhatian adalah Bengkulu. Pada September 2019, *Bisnis* menghabiskan 12 jam untuk mencapai Bengkulu dari Palembang. Saat itu, *Bisnis* menunggang Isuzu MUX untuk melahap 219 km jalan nasional di lintas tengah Sumatra.

Bengkulu yang pernah berjaya pada abad ke-18 kini menjadi provinsi paling tertinggal di Sumatra. Data BPS menunjukkan, produk domestik regional bruto Bengkulu pada 2018 mencapai Rp66,41 triliun, terendah di Sumatra.

Untuk itu, di samping koridor utama yang menghubungkan Bakauheni—Banda Aceh, pembangunan Trans-Sumatra juga mencakup tiga koridor pendukung atau sirip. Ketiga koridor itu yakni Kuala Tanjung—Tebing Tinggi—Parapat—Sibolga, Dumai—Pekanbaru—Padang, dan Palembang—Lubuklinggau—Bengkulu.

Secara keseluruhan, 24 ruas yang ditugaskan kepada PT Hutama Karya mencapai 2.765 km. Penugasan tertuang dalam Perpres No. 117/2015.

INDUSTRIALISASI

Proyek Trans-Sumatra sesungguhnya tidak layak secara finansial. Biaya investasi terbilang mahal karena kontur lahan yang amat menantang, mulai dari tanah lunak, lahan gambut, daerah rawa, hingga membentur pegunungan.

Namun, pemerintah punya komitmen besar untuk membangun jalan tol di Sumatra. Seluruh ruas Trans-Sumatra masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) yang tercantum pada Perpres No. 58/2017.

Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo mengatakan investasi pembangunan tol di Sumatra bisa disumbang dari pemanfaatan lahan di sekitar jalan tol (*value capture*). Sebelumnya, pemerintah sudah mengucurkan injeksi modal ke Hutama Karya di samping memberikan penjaminan atas pinjaman dan penerbitan surat utang.

Bintang menyebut ada 85 potensi ekonomi di sepanjang koridor Trans-Sumatra yang bisa digarap, mulai dari pembangkit listrik, kawasan industri, bandara, pelabuhan, hingga infrastruktur perairan seperti irigasi dan bendungan.

"Kami akan membangun zona industri yang terkait dengan kelapa sawit, kopi, dan lain-lain. Komoditas itu disebarkan ke tempat-tempat lain melalui Trans-Sumatra," tuturnya.

Sejauh ini, Hutama Karya sudah menjalin kesepakatan dengan para mitra untuk mengembangkan kawasan pariwisata di Bakauheni dan kawasan industri di Panjang. Lahan yang akan disulap mencapai lebih dari 100 ha untuk masing-masing lokasi. Untuk mendukung industrialisasi, pasokan listrik juga perlu terjamin.

General Manager PLN UID Lampung Pandapotan Manurung mengatakan pertumbuhan industri di Lampung tumbuh pesat dan semakin kuat berkat kehadiran Tol Trans-Sumatra. Saat ini, pertumbuhan industri di Lampung diklaim menjadi yang tertinggi se-Sumatra yaitu lebih dari 9%.

Realisasi pembangunan Tol Trans-Sumatra memang masih seperlima dari target. Namun, dari apa yang sudah terbangun, geliat dan harapan sudah muncul ke permukaan. Bukan tidak mungkin, jalan tol akan mengubah banyak wajah Sumatra pada masa depan.

Inovasi Untuk Solusi
BNI

Bisnis Indonesia JELAJAH INFRASTRUKTUR SUMATRA 2019

Tren Pertumbuhan Ekonomi Sumatra

Tahun	Sumatra	Nasional	Pangsa PDB Sumatra
2014	4.66%	5.01%	23.16%
2015	3.54%	4.88%	22.21%
2016	4.29%	5.03%	22.03%
2017	4.30%	5.07%	21.66%
2018	4.54%	5.17%	21.58%
Kuartal III/2019	4.49%	5.02%	21.14%

Sumber: BPS, badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), KPPIP, diolah. BISNIS/TRI UTOMO

Ruas Tol Operasi Trans Sumatra hingga 2020

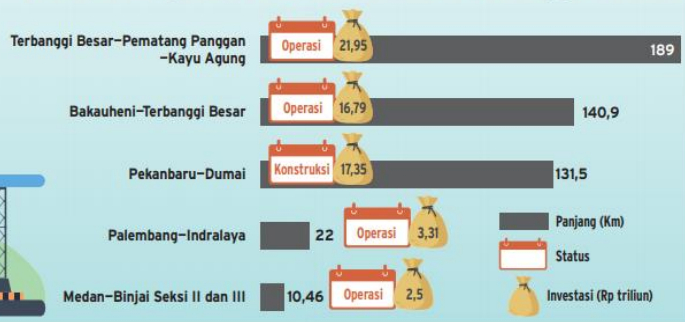

Judul	**Melanjutkan Visi Bung Karno Membangun Basis Produksi**	Tanggal	Selasa, 17 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 6		
Resume	Lima tahun terakhir bukan tahun yang menggembirakan bagi Sumatra. Pulau yang menjadi motor perekonomian kedua bagi Indonesia itu tengah payah. Mesin-mesin penghasil uang lesu darah karena tarpaper penurunan harga komoditas.		

Melanjutkan Visi Bung Karno Membangun Basis Produksi

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Lima tahun terakhir bukan tahun yang menggembirakan bagi Sumatra. Pulau yang menjadi motor perekonomian kedua bagi Indonesia itu tengah payah. Mesin-mesin penghasil uang lesu darah karena tarpapar penurunan harga komoditas.

Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sumatra selalu di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dalam 5 tahun terakhir. Sumbangsih ekonomi Sumatra bahkan terus lungsur ke level 21,14% pada kuartal III/2019.

Untuk melepas ketergantungan dari pergerakan harga komoditas, rencana industrialisasi di Sumatra sudah direncanakan sejak lama. Rencana ini tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pembangunan jalan tol menjadi salah satu aspek dalam rencana induk tersebut.

Visi membangun Tol Trans-Sumatra dimulai pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian dieksekusi pemerintahan Joko Widodo. Megaproyek ini ibarat mengulang visi Presiden Soekarno pada 1964.

Lewat Perpres Perpres No.17/1964, Bung Karno membentuk Otorita Jalan Raya Lintas Sumatra. Tugas badan tersebut antara lain membangun jalan lintas Sumatra sepanjang 2.400 kilometer (km) dari Panjang, Lampung, hingga Banda Aceh.

Dalam penjelasan beleid tersebut, jalan raya dibutuhkan untuk menjadi urat nadi dalam menggerakkan kegiatan di perekonomian. Berkat jalan raya, Sumatra bisa merintis industrialisasi hingga ke level yang diperlukan untuk bertumbuh secara mandiri dan berkelanjutan (*self propelling growth*).

Selain perekonomian, jalan raya juga dibangun untuk kemudahan penyelenggaraan pemerintahan, transmigrasi, dan pertahanan wilayah. Secara singkat, jalan raya lintas Sumatra adalah alat untuk mencapai *distribution of wealth*.

Apa yang menjadi visi Bung Karno, sebagian beririsan dengan tujuan dari MP3EI, terutama pembangunan di koridor Sumatra. Irisan itu terangkum dalam lema konektivitas.

Saat ini, jalan lintas Sumatra memang sudah terbangun. Namun, jalan nasional tersebut tidak lagi bisa diandalkan. Waktu tempuh yang lama dan gangguan keamanan membuat potensi sumber daya alam tak bisa digenjot optimal.

Alih-alih melakukan hilirisasi, komoditas Sumatra lebih banyak diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi.

Praktik itu dalam jangka pendek memang menyenangkan. Uang datang dengan cepat. Namun, dalam jangka panjang, siapa yang bisa mengira harga bisa tersungkur lalu membuat sengsara? Oleh karena itu, industrialisasi bisa menjadi resep bagi Sumatra untuk melepas ketergantungan terhadap komoditas.

Pembangunan Trans-Sumatra memang belum tuntas seluruhnya. Namun, megaproyek ini perlu terus berlanjut, meneruskan visi Bung Karno menjadikan Sumatra sebagai basis produksi nasional.

Judul	**Merekam Geliat Tanah Sumatra**	Tanggal	Selasa, 17 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7		
Resume	Pembangunan infrastruktur jalan tol pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi prioritas utama. Tujuan pembangunan infrastruktur tersebut selain untuk menekan biaya logistik juga untuk pemerataan ekonomi di Indonesia.		

JELAJAH INFRASTRUKTUR TRANS SUMATRA

Merekam Geliat Tanah Sumatra

Foto aerial tol Bakauheni–Terbanggi Besar

Bisnis/Abdullah Azzam

Pembangunan infrastruktur jalan tol pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi prioritas utama. Tujuan pembangunan infrastuktur tersebut selain untuk menekan biaya logistik juga untuk pemerataan ekonomi di Indonesia.

Pembangunan yang begitu masif mulai bisa dirasakan oleh masyarakat, seperti tol Trans-Sumatra. Jalan tol yang rencananya dibangun mulai dari Lampung hingga Aceh tersebut memiliki panjang 2.818 km.

Bisnis Indonesia secara khusus menerjunkan tim Jelajah Infrastruktur Sumatra 2019. Ekspedisi tersebut dibagi menjadi 3 tahap. Fase I, tim menyusuri jalan tol mulai dari Pelabuhan Bakauheni hingga Palembang.

Pada fase II, tim kembali menyusuri ruas jalan tol Bakauheni—Terbanggi Besar (Bakter) sepanjang 140,9 kilometer di Provinsi Lampung, dan lalu melanjutkan perjalanan menuju Palembang dengan melintasi ruas tol Terpeka yang terdiri atas Terbanggi Besar—Pematang Panggang, dan Pematang Panggang—Kayuagung. Dari Palembang, tim menuju ke Provinsi Bengkulu.

Pada fase III, tim melakukan perjalanan dari Pekanbaru ke Dumai (Pekdum).

(Abdullah Azzam)

Bisnis/Abdullah Azzam

Kendaraan melintas di ruas tol Palembang–Indralaya

Bisnis Indonesia
JELAJAH INFRASTRUKTUR SUMATRA 2019

Bisnis/Nurul Hidayat

Proses konstruksi ruas tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung

Bisnis/Nurul Hidayat

Gerbang tol Kotabaru

Bisnis/Himawan L. Nugraha

Foto aerial ruas tol Pekanbaru–Dumai

Bisnis/Himawan L. Nugraha

Pemasangan tiang pancang tol Pekanbaru–Dumai

Judul	**Layanan Jagowari ditingkatkan**	Tanggal	Selasa, 17 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 10		
Resume	PT Jasa Marga (persero) Tbk. Berupaya terus meningkatkan layanan jalan tol di ruas tol Jakarta-Bogor-Ciawi alias Jagorawi, terkait di setujuinya penyesuaian tarif ruas tol tersebut yang mulai berlaku kamis (19/12).		

PENYESUAIAN TARIF

Layanan Tol Jagorawi Ditingkatkan

Bisnis, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. berupaya terus meningkatkan layanan jalan tol di ruas tol Jakarta-Bogor-Ciawi alias Jagorawi, terkait disetujuinya penyesuaian tarif ruas tol tersebut yang mulai berlaku Kamis (19/12).

Communication Department Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Regional JabodetabekJabar Irra Susiyanti menyampaikan pihaknya terus berupaya mendukung terpenuhinya unsur kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan di tol Jagorawi melalui sejumlah peningkatan layanan.

Dalam layanan transaksi, katanya, Jasa Marga telah melakukan peningkatan kapasitas gerbang tol, menambah gardu tol, *mobile reader*, dan peremajaan peralatan tol terus.

"Tujuannya agar meningkatan kinerja layanan untuk mempercepat waktu transaksi dan yang lainnya," ujarnya kepada *Bisnis* melalui pesan singkat Senin (16/12).

Pada layanan lalu lintas, katanya, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas lajur, perbaikan, dan pengecatan ulang marka dan rambu. Selain itu, penempatan petugas di titik-titik rawan kepadatan dan kecelakaan, juga telah dilakukan, termasuk rekayasa-rekayasa lalu lintas dan peremajaan CCTV dan pengadaan alat-alat keselamatan.

Di bidang layanan konstruksi, Jasa Marga secara rutin melakukan perbaikan jalan antara lain *scraping, filling,* dan *overlay.*

"Jasa Marga juga rutin melakukan rekonstruksi jalan, memperindah dan merapikan lansekap, melakukan pembersihan, perawatan drainase, pemeliharaan rumput, dan penguatan konstruksi jembatan," paparnya.

Tol Jagorawi segera menerapkan tarif baru setelah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1175/KPTS/M/2019 sebagai landasan hukum penyesuaian tarif dari tol pertama yang beroperasi di Indonesia.

Jasa Marga pun telah mengumumkan bahwa tarif baru tol Jagorawi mulai diberlakukan pada 19 Desember 2019."Mulai Tanggal 19 Desember Pukul 00.00 WIB, akan diberlakukan penyesuaian Tarif Ruas Tol Jagorawi," tulisnya dalam akun Twitter-nya *@PTJasaMarga*, Minggu (15/12).

Perincian penyesuaian tarif tersebut adalah Golongan I menjadi Rp7.000 dari sebelumnya Rp6.500, dan tarif Golongan II naik menjadi Rp11.500 dari Rp9.500.

Kemudian, tarif Golongan III yang semula Rp13.000 turun menjadi Rp11.500, lalu tarif Golongan IV dan V menjadi sama yakni Rp 16.000.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengatakan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sudah melaksanakan perintah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di ruas tol Jagorawi, sehingga bisa menetapkan tarif baru tersebut.

"Iya, pengelola [Jasa Marga] telah memenuhi permintaan Menteri PUPR untuk penuhi SPM di Tol Jagorawi," ujar Danang dalam pesan singkat kepada *Bisnis,* Senin (16/12).

Pemenuhan SPM memang menjadi salah satu fokus operator jalan tol pelat merah ini. Jasa Marga diketahui terus melakukan beragam upaya guna memenuhi SPM di ruas tol tersebut. *(Aprianus Doni T)*

Judul	**13 Paket Konstruksi Dilelang**	Tanggal	Selasa, 17 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 10		
Resume	Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, nilai pekerjaan konstruksi (harga Pemikiran sendiri) dari 13 paket yang dilelang mencapai Rp8,77 triliun. Proyek Bendungan Jragung di Jawa Tengah menjadi proyek dengan nilai terbesar, yaitu Rp2,72 triliun.		

PROYEK BENDUNGAN

13 Paket Konstruksi Dilelang

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuka pelelangan 13 paket konstruksi dari 9 proyek bendungan hingga pekan kedua Desember 2019.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Berdasarkan data yang dihimpun *Bisnis*, nilai pekerjaan konstruksi (harga perkiraan sendiri) dari 13 paket yang dilelang mencapai Rp8,77 triliun. Proyek Bendungan Jragung di Jawa Tengah menjadi proyek dengan nilai terbesar, yaitu Rp2,72 triliun.

Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR, Ni Made Sumiarsih mengatakan sejauh ini pihaknya telah meneken kontrak untuk pekerjaan konstruksi Bendungan Leuwikeris Paket 4 yang berlokasi di Jawa Barat. "Leuwikeris Paket 4 sudah tanda tangan kontrak. Gongseng rencananya minggu ini," ujarnya kepada *Bisnis*, baru-baru ini.

Di proyek Bendungan Leuwikeris Tbk. keluar sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp771,01 miliar. Jumlah tersebut di bawah harga perkiraan sendiri (HPS) Rp804,36 miliar.

Berdasarkan data Layanan Pengadaaan Secara Elektronik LPSE), ada tiga proyek yang melewati jadwal pengumuman pemenang pada 13 Desember 2019 lalu. Ketiga proyek itu yakni Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, dan Bendungan Tukul. Data LPSE yang diakses Senin (16/12) menunjukkan, kontrak untuk ketiga bendungan tersebut belum dibuat.

Secara keseluruhan, volume tampung gabungan dari sembilan proyek yang sudah dilelang mencapai 431,05 juta meter kubik.

Menurut data LPSE, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. memenangi lelang proyek Bendungan Bendo dengan penawaran Rp317,44 miliar. Adapun PT Brantas Abipraya (Persero) disebut sebagai pemenang lelang Bendungan Tukul dengan penawaran Rp268,69 miliar.

Sementara itu pada proyek Bendungan Gongseng, data LPSE belum menunjukkan pemenang. Waskita Karya dan PT Hutama Karya (Persero) mendapat penilaian teknis tertinggi pada pelelangan proyek tersebut.

Selain empat bendungan yang disebutkan di atas, ada lima proyek bendungan lain yang juga dilelang. Kelima proyek itu yakni Bendungan Tiu Suntuk, Bendungan Ladongi Paket 2, Bendungan Jragung, Bendungan Ameroro, dan Bendungan Budong-

Dari lima proyek tersebut, dua proyek bendungan yaitu Bendungan Ameroro dan Bendungan Budong-Budong saat ini masih dalam tahap prakualifikasi dan tahap pengumuman pemenang dijadwalkan pada Februari 2020.

Secara keseluruhan, volume tampung gabungan dari sembilan proyek yang sudah dilelang mencapai 431,05 juta meter kubik. Daya tampung tersebut bisa dimanfaatkan untuk sumber irigasi lahan pertanian seluas 49.006 hektare. Luas tersebut setara dengan 3/4 luas Jakarta yang mencapai 661,5 kilometer persegi.

PROGRAM IRIGASI

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melanjutkan salah satu program

Antara

yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi atau P3TGAI. Rencananya, program tersebut akan dilakukan di 6.000 lokasi pada tahun depan dengan alokasi dana mencapai Rp1,35 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suprayogi mengatakan bahwa program P3TGAI yang merupakan program padat karya akan terus dilakukan karena petani dilibatkan secara langsung dalam perbaikan dan pengembangan saluran irigasi.

"P3TGAI adalah program padat karya dan yang mengerjakan adalah petani sendiri. Tahun lalu dilakukan di 9.000 titik di seluruh indonesia," ujarnya di Banten beberapa waktu lalu.

Dalam penentuan lokasi penyelenggaraan P3TGAI, lanjutnya, akan mempertimbangkan usulan yang masuk. Namun, Hari memastikan bahwa daerah yang masuk dalam program On Farm akan diprioritaskan.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan bahwa P3TGAI sangat positif guna mendukung ketahanan pangan sekaligus pemberdayaan petani. Pasalnya, irigasi menjadi faktor penting dalam pertanian dan di sebagian besar saluran irigasinya rusak dan perlu diperbaiki dan dikembangkan.

"Kalau dari sisi kepentingannya ya sangat penting, karena irigasi di dan efisiensi penggunaan air irigasi, sesuai hasil studi yang pernah dilakukan, hanya 10%. Kita tingkatkan menjadi 15% saja itu sudah bagus," paparnya kepada *Bisnis*.

Terkait penetapan lokasi pelaksanaan program pertanian seperti P3GAI, Dwi menilai pemerintah sudah memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan lokasi. Namun, dia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan empat faktor di dalam sebuah wilayah pertanian yakni *agroclimate*, infrastruktur penunjang seperti akses jalan, budidaya bibit tanaman dan teknologinya, dan sosial ekonomi.

"Kalau salah satu dari empat faktor tersebut tidak terpenuhi maka jangan paksakan program tersebut dijalankan di sana," imbuhnya. *(Aprianus Doni T)*

Judul	**Berita Foto**	Tanggal	Selasa, 17 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 10		
Resume	Kendaraan melintas di jalan tol Bogor-Ciawi sukabumi (Bocimi) seksi 1 ciawi-Cigombong di cigombong, kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (16/12). Kelanjutan pembangunan jalan tol Bocimi seksi ll (Cigombong-Cibadak) Sepanjang 11,9 km saat ini pembebasan lahanya sudah mencapai lebih dari 70% dan telah memasuki tahap konstruksi serta diharapkan selesai sesuai rencana pada 2020		

KELANJUTAN PEMBANGUNAN TOL BOCIMI

Antara/Arif Firmansyah

Kendaraan melintas di jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi I Ciawi-Cigombong di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (16/12). Kelanjutan pembangunan jalan tol Bocimi seksi II (Cigombong-Cibadak) sepanjang 11,9 km saat ini pembebasan lahannya sudah mencapai lebih dari 70% dan telah memasuki tahap konstruksi serta diharapkan selesai sesuai rencana pada 2020.

Judul	**Jalan Tol Menarik Masyarakat**	Tanggal	Selasa, 17 Desember 2019
Media	Kompas Halaman 13		
Resume	Pengoperasian jalan tol di sekitar Jakarta Serta Bakauheni sampai Palembang di Sumatera diperkirakan menarik masyarakat untuk mencoba ruas tol pada liburan Natal dan Tahun Baru. Mengacu pada perkiraan itu, titik penumpukan kendaraan mungkin terjadi di pelabuhan dan beberapa gerbang tol.		

Jalan Tol Tarik Masyarakat

Masyarakat diperkirakan akan menggunakan momentum libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 untuk mencoba jalan tol baru. Pengguna jalan tol mesti mematuhi aturan batas kecepatan.

JAKARTA, KOMPAS — Pengoperasian jalan tol di sekitar Jakarta serta Bakauheni sampai Palembang di Sumatera diperkirakan menarik masyarakat untuk mencoba ruas tol pada liburan Natal dan Tahun Baru. Mengacu pada perkiraan itu, titik penumpukan kendaraan mungkin terjadi di pelabuhan dan beberapa gerbang tol.

Berdasarkan hasil survei Badan Litbang Kementerian Perhubungan, sekitar 60 persen pemudik menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 dari wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sementara sekitar 70 persen pemudik bergerak ke Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Ruas yang baru dioperasikan di antaranya Tol Layang Jakarta-Cikampek. Ruas Bakauheni-Kayu Agung sudah beroperasi penuh, sedangkan Kayu Agung-Palembang masih berupa tol fungsional.

Khusus di wilayah Sumatera, hal yang diperhatikan adalah tempat istirahat dan pelayanan serta kemungkinan kendaraan menumpuk di pelabuhan.

"Keberadaan tol Lampung sampai Palembang memberikan stimulus bagi masyarakat untuk ke Jawa dan sebaliknya. Demikian pula Tol Layang Jakarta-Cikampek telah beroperasi. Saya kemarin lihat dari siang sampai malam ada peningkatan kendaraan. Masyarakat terbantu," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, Senin (16/12/2019), di Jakarta.

Prediksi Jumlah Penumpang Angkutan Umum (juta orang)

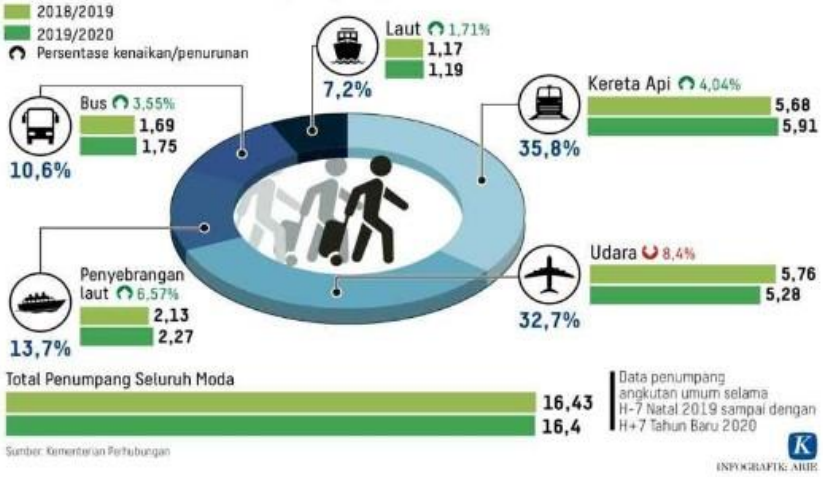

Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub Sigit Irfansyah menambahkan, di sepanjang Tol Bakauheni sampai dengan Kayu Agung ada 12 titik tempat istirahat dan pelayanan. Sementara semua stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) telah dilengkapi fasilitas pengisian bahan bakar minyak.

Meningkat

Budi menambahkan, pengguna Tol Layang Jakarta-Cikampek diperkirakan meningkat. Peningkatan itu, antara lain, dipicu keinginan masyarakat mencoba tol baru. Selain itu, moda transportasi yang digunakan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru diperkirakan tetap didominasi kendaraan pribadi.

Di tol layang itu, kata Budi, masih ada sambungan antarjembatan yang kurang rata. Meski demikian, jika pengguna jalan memenuhi ketentuan dengan kecepatan maksimal 80 kilometer per jam, sambungan yang kurang rata itu tidak akan jadi masalah.

"Kalau kecepatan tinggi, akan membuat kendaraan seperti melompat. Di situ pengawasannya akan menggunakan CCTV," ujar Budi.

Lebih lanjut Budi menyatakan, penumpukan kendaraan di gerbang tol diperkirakan terjadi di Cikampek Utama, Kalihurip Utama, dan Cileunyi.

Terkait dengan penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru, Kemenhub telah menjalankan inspeksi keselamatan untuk 13.883 unit bus pariwisata. Dari jumlah itu, sebanyak 5.412 unit di antaranya tidak lolos pemeriksaan, sedangkan 8.471 unit lolos. Pemeriksaan hanya ditujukan bagi bus pariwisata karena untuk bus reguler sudah diinspeksi petugas ketika masuk terminal.

Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub Pandu Yunianto menuturkan, penyebab kendaraan dinyatakan tidak lolos pemeriksaan antara lain tanda uji kir sudah mati. Namun, ada juga karena kendaraan belum terdaftar atau belum memperpanjang izin dan tidak memiliki perlengkapan penunjang, seperti kotak obat.

Sementara itu, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, berpandangan, keberadaan tol baru secara alamiah akan mendorong masyarakat untuk mencobanya. Apalagi antara Bakauheni dan Palembang biasanya memerlukan waktu tempuh hingga 12 jam.

"Sekarang bisa ditempuh 4-5 jam. Tentu hal ini menumbuhkan usaha serta pola mobilitas baru. Kebetulan penyeberangannya sudah bagus sehingga menambah mobilitas orang Jawa ke Sumatera dan sebaliknya," kata Djoko.

Menurut Djoko, pemerintah perlu membatasi atau mengawasi kecepatan kendaraan sesuai dengan ketentuan batas maksimal dan minimal. Sebab, seperti dilakukan di ruas Mojokerto-Surabaya (Jawa Timur), pembatasan kecepatan terbukti menekan angka kecelakaan.

Di sisi lain, untuk Natal dan Tahun Baru, kebanyakan mobilitas yang terjadi untuk kegiatan wisata. Inspeksi keselamatan untuk bus pariwisata diharapkan juga dapat dilakukan di lokasi-lokasi wisata. (NAD)

Judul	**Tantangan bagi Program Sejuta Rumah**	Tanggal	Selasa, 17 Desember 2019
Media	Media Indonesia Halaman 15		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengumumkan pembangunan program Sejuta Rumah mencapai 1,21 juta unit per Desember 2019. Adapun target yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini sekitar 1,25 juta unit.		

Tantangan bagi Program Sejuta Rumah

Pemerintah perlu menyiapkan hunian yang terkoneksi dengan transit oriented development (TOD).

Tesa Oktiana Surbakti
tesa@mediaindonesia.com

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengumumkan pembangunan program Sejuta Rumah mencapai 1,21 juta unit per Desember 2019. Adapun target yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini sekitar 1,25 juta unit.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PU-Pera Khalawi Abdul Hamid mengungkapkan, capaian program Sejuta Rumah itu termasuk program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui bantuan stimulan perumahan swadaya. Pada tahun depan, lanjut dia, terdapat sejumlah tantangan dalam pembangunan perumahan.

Tantangan itu seperti keterbatasan lahan perumahan, keterbatasan kemampuan pendanaan pemerintah, selisih antara pasokan rumah dan kebutuhan (*backlog*), dan rumah tidak layak huni yang masih besar.

"Tantangan lain, yaitu pemenuhan *sustainable development goals* (SDGs) serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas rumah layak huni. Kami juga masih menghadapi tantangan pengendalian *urban sprawl*," jelas Khalawi melalui pesan singkat, kemarin.

Lebih lanjut, dia menyoroti tantangan pengembangan teknologi dan metode konstruksi perumahan yang efisien dan berkualitas. Perampingan aturan (*omnibus law*) dan penyederhanaan regulasi pun menjadi tantangan tersendiri.

Disinggung target pada 2020, Khalawi mengatakan, pemerintah berkomitmen melanjutkan program Sejuta Rumah yang disertai langkah penguatan dan inovasi. "Target program Sejuta Rumah pada 2020 minimal sama dengan capaian tahun ini," imbuhnya.

> "Kami melihat pembangunan perumahan selama ini berhasil menekan angka *backlog*."
>
> **Khalawi Abdul Hamid**
> Dirjen Penyediaan Perumahan

Khalawi optimistis program Sejuta Rumah pada tahun ini mencapai target, yakni 1,25 juta unit. Sepanjang 2015-2018, realisasi pembangunan perumahan tercatat 3,54 juta unit, termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan rincian 2,48 juta unit khusus MBR dan 1,06 juta unit non-MBR.

"Kami melihat pembangunan perumahan selama ini berhasil menekan angka *backlog*, khususnya untuk MBR. Namun, ke depan, pemerintah meningkatkan pemenuhan perumahan bagi seluruh masyarakat, khususnya MBR," tutup Khalawi.

Harusnya lebih tinggi

Di sisi lain, pengamat properti sekaligus Direktur Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda berpendapat capaian program Sejuta Rumah pada tahun ini seharusnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Itu karena besarnya kebutuhan rumah dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Seperti diketahui, *backlog* di Tanah Air berkisar 11,4 juta unit.

"Seharusnya capaian tahun ini dapat lebih tinggi lagi karena permintaan memang cukup tinggi. Apalagi, permintaan dari segmen menengah bawah. Anggaran perumahan juga harus lebih besar pada tahun depan," ujar Ali saat diminta tanggapan, kemarin.

Dia mengamini capaian program sejuta rumah 1,21 juta unit pada tahun ini lebih tinggi dari realisasi 2018 sebesar 1,13 juta unit.

Akan tetapi, realisasi sepanjang tahun ini dikatakannya mencakup unsur rumah swadaya dan rumah khusus, yang sejatinya tidak dapat dimasukkan dalam pencapaian.

Pemerintah, lanjut dia, perlu menyiapkan hunian yang terkoneksi dengan *transit oriented development* (TOD). Ini khususnya untuk hunian di wilayah perkotaan.

"Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada fisik yang terbangun, tapi juga memastikan manfaat dari hunian tersebut," pungkas Ali. (S-3)

Judul	**Berita Foto**	Tanggal	Selasa, 17 Desember 2019
Media	Media Indonesia Halaman 15		
Resume	Foto udara pembangunan rumah bersubsidi di Banyuasin, Sumatra Selatan, bebarapa waktu lalu. Pencapaian empat tahun pemerintahan Joko Widodo-jusuf kalla di bidang penyediaan perumahan rakyat sebanyak 1.139.672 unit yang terbangun lewat program Sejuta Rumah.		

ANTARA/NOVA WAHYUDI

RUMAH BERSUBSIDI: Foto udara pembangunan rumah bersubsidi di Banyuasin, Sumatra Selatan, beberapa waktu lalu. Pencapaian empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang penyediaan perumahan rakyat sebanyak 1.139.672 unit yang terbangun lewat program Sejuta Rumah.

Judul	**Beda Gelombang di Jalan Tol Layang**	Tanggal	Selasa, 17 Desember 2019
Media	Kompas Halaman 17		
Resume	Foto karya wartawan foto Kompas, Totok Wijayanto, ini diabadikan pada Minggu (15/12/2019), Totok menggunakan lensa 70-200 mm dari atap Hotel Amaris di Kawasan Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat, Saat memotret frame itu, posisi lensa Totok berada di angka 200mm, itu berarti bahwa pemotretan dilakukan dengan lensa 200 mm. selain itu Totok juga melakukan cropping atas foto didapatkannya		

Beda Gelombang di Jalan Tol Layang

Pada Senin (16/12/2019), halaman muka harian *Kompas* menampilkan foto pengoperasian untuk umum Jalan Tol Layang Jakarta–Cikampek. Foto yang diambil di sekitar Bekasi, Jawa Barat, itu menampilkan pemandangan jalan tol yang bergelombang. Jalan layang itu sekilas terlihat membahayakan karena naik dan turunnya gelombang di foto tampak besar. Jajaran punggung gelombang juga terlihat banyak.

Wisnu Widiantoro

FOTO-FOTO: KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Searah jarum jam dari atas:
Foto Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II yang difoto dengan lensa 200 mm. Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II difoto dengan lensa 35 mm. Foto Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II yang difoto dengan lensa 75 mm.

Foto karya wartawan foto *Kompas*, Totok Wijayanto, ini diabadikan pada Minggu (15/12/2019). Totok memotret jalan tol layang itu dengan menggunakan lensa 70-200 mm dari atap Hotel Amaris di kawasan Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat. Saat memotret *frame* itu, posisi lensa Totok berada di angka 200 mm. Itu berarti bahwa pemotretan dilakukan dengan lensa 200 mm. Selain itu Totok juga melakukan *cropping* atas foto yang didapatkannya.

Beberapa jam setelah harian *Kompas* menampilkan foto pengoperasian Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, seorang teman mengirimkan pesan di grup Whatsapp (WA) terkait jalan tol layang yang difoto Totok. Dalam pesan itu dinyatakan, foto yang diambil dari berita banyak yang tak proporsional sehingga tiang penerangan jalan umum tampak terlalu dekat. Gelombang di jalan layang yang terlihat di foto itu juga membuat kaget orang.

Di samping pesan itu, disertakan juga foto-foto dengan kamera *drone* dari lokasi yang sama. Dalam foto-foto itu, gelombang di jalan tol layang terlihat tidak ekstrem. Gelombang terlihat lebih landai dan panjang sehingga tidak membuat kaget pengguna jalan. Selain itu, berdasarkan data spesifikasi jalan layang yang disertakan, panjang antarpuncak gelombang jalan berkisar 791 meter hingga 950 meter.

Foto kiriman di grup WA itu dari awal disebutkan diambil dari *drone*. Lewat pencarian di internet, diketahui spesifikasi lensa kamera *drone* dari merek yang paling sering digunakan di masyarakat berkisar antara 28-48 mm. Dalam dunia fotografi, lensa dengan panjang fokal di bawah 50 mm merupakan lensa lebar.

Tentunya foto hasil karya Totok dan *drone* ini adalah foto asli. Di foto Totok dipastikan tidak ada rekayasa terkait apa yang ada dalam foto, kecuali pencahayaan (kontras, level). Terus, apa yang membuat perbedaan kedua foto itu? Jawaban paling masuk akal adalah perbedaan panjang fokal lensa yang dipakai untuk memotret.

Karakter lensa tele dengan panjang fokal 200 mm adalah membuat benda-benda yang difoto tampak berdekatan. Dengan lensa tele, fotografer dapat memotret dan menghasilkan kesan padat pada foto yang dihasilkan. Dalam kasus foto jalan tol layang, gelombang tampak besar dan curam. Sementara lensa lebar dengan panjang fokal 28-48 mm akan menghasilkan foto dengan obyek yang terlihat saling berjauhan. Dengan lensa ini, gelombang jalan tol terlihat landai dan panjang.

Sebelum heboh foto gelombang di jalan tol layang tersebut, pada 2016 di Malang, Jawa Timur, juga pernah heboh foto Jembatan Soekarno-Hatta yang terlihat melengkung. Foto ini membuat banyak orang enggan untuk melintas karena takut jembatan akan roboh. Ternyata itu hanya efek mode panorama. Sesungguhnya jembatan tersebut baik-baik saja.

Kembali ke soal tol layang, pemilihan lensa untuk memotret jalan tol itu tentunya menghasilkan foto dengan kesan berbeda.

SHARE